



SALINAN

**BUPATI SRAGEN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 70 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN  
OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban ketertiban administrasi keuangan atas penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun 2024;
  - b. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi perencanaan dan pelaksanaan penggunaan dana dengan memanfaatkan anggaran untuk memprioritaskan program Nasional di Daerah yang tepat sasaran;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun 2024 serta mempertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen.
5. Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BOKB adalah dana alokasi khusus non fisik subbidang keluarga berencana yang dialokasikan kepada Daerah untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan Daerah dalam mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana serta penurunan *Stunting*.
6. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

BAB II  
BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA

Pasal 2

- (1) BOKB merupakan bantuan operasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta penurunan *Stunting* pada Dinas.

(2) BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta penurunan *Stunting* pada Dinas penerima dana alokasi khusus nonfisik subbidang keluarga berencana.

### Pasal 3

- (1) BOKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas biaya operasional:
- a. balai penyuluhan KB;
  - b. pelayanan KB;
  - c. penggerakan di kampung KB;
  - d. penurunan *stunting*; dan
  - e. pembinaan Program Bangga Kencana oleh Kader.
- (2) Alokasi distribusi penggunaan dana BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 4

Petunjuk teknis BOKB tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.



Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,  
ttd

HARGIYANTO  
BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023 NOMOR 70



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 70 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PENGUNAAN DANA BANTUAN  
OPERASIONAL KELUARGA  
BERENCANA TAHUN 2024

PETUNJUK TEKNIS BOKB

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026, sedangkan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 merupakan tahun terakhir yang didalamnya untuk mendukung Program Bangga Kencana dan adanya target penurunan prevalensi *stunting* menjadi prioritas. Diperlukan upaya pencapaian program sensitif dan spesifik untuk mengejar ketertinggalan target yang belum tercapai. Oleh karena itu kebijakan strategi dan alokasi penganggaran APBD dengan melalui Dana ABPN yakni DAK Non Fisik BOKB tahun anggaran 2024 menjadi sangat strategis dalam mencapai target indikator program. BOKB merupakan bagian dari DAK Nonfisik yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, di dalamnya termasuk pengelolaan DAK. DAK adalah bagian dari transfer ke daerah dan dana desa yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas serta membantu dalam operasional layanan publik yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. BOKB merupakan DAK Nonfisik yang digunakan untuk membantu operasional layanan publik di daerah. Dasar hukum lain yang juga perlu diperhatikan adalah Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan kabupaten dalam urusan pengendalian penduduk dan Keluarga berencana yang dioperasionalkan dalam Program Bangga Kencana yang bertujuan untuk mewujudkan Keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu didukung berbagai kegiatan prioritas, antara lain kegiatan-kegiatan dalam upaya mengendalikan angka kelahiran, meningkatkan Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR), menurunkan tingkat kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*), serta upaya perwujudan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan menghasilkan Bonus Demografi dan upaya pengendalian penduduk untuk berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Serta Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan

Penurunan *Stunting*. dimana perlu adanya koordinasi serta konvergensi program di lapangan. Dengan adanya BOKB ini memberikan dukungan anggaran bagi daerah dalam program percepatan penurunan *stunting* melalui 2 (dua) menu utama yaitu pelayanan KB dan penurunan *stunting*. Untuk memastikan berbagai kegiatan prioritas Program Bangga Kencana serta penurunan *stunting* dapat berjalan dengan baik disertai dengan komitmen Pemerintah Daerah kabupaten Sragen terhadap urusan pengendalian penduduk dan Keluarga berencana. Salah satu bentuk komitmen yang diharapkan adalah dengan meningkatkan kontribusi APBD yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan operasional yang mengacu pada kegiatan prioritas pembangunan nasional sesuai kewenangannya, serta alokasi dukungan sarana prasarana untuk penyelenggaraan Program Bangga Kencana serta penurunan *stunting*. Apabila komitmen tersebut tidak optimal maka akan berdampak pada sulitnya pencapaian target/sasaran Program Bangga Kencana yang sudah ditetapkan.

## B. Arah Kebijakan dan Strategi

### 1. Kebijakan

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen sesuai kewenangannya wajib mengalokasikan anggaran untuk urusan pengendalian penduduk dan Keluarga berencana melalui alokasi APBD serta dapat didukung oleh Transfer ke Daerah yang di dalamnya terdapat DAK Fisik dan BOKB.
- b. Pengalokasian dana BOKB untuk Balai Penyuluhan KB, pelayanan KB, penggerakan di Kampung KB, penurunan *stunting* serta pembinaan Program Bangga Kencana oleh kader PPKBD atau Sub-PPKBD, berdasarkan harga satuan yang tertuang dalam Pedoman Analisis Standar Belanja Kabupaten Sragen Tahun 2024 serta Standar Harga Kabupaten Sragen Tahun 2024.
- c. Pelaksanaan dana BOKB dapat menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan BOKB yang berpedoman pada Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024 dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- d. Melakukan optimalisasi fungsi Balai Penyuluhan KB sebagai pusat pengendali operasional Program Bangga Kencana serta penurunan *stunting* di lini lapangan serta dapat meningkatkan pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana, Petugas Lapangan Keluarga Berencana untuk melaksanakan kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian target/sasaran Program Bangga Kencana serta penurunan *stunting*, baik melalui alokasi BOKB atau APBD.
- e. Alokasi anggaran dan kegiatan BOKB dilaksanakan oleh Dinas PPKBPPA Kabupaten Sragen dan PLKB/PKB dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan penggunaan dana bantuan operasional keluarga berencana tahun 2024 serta memperhatikan petunjuk teknis penggunaan BOKB dan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Strategi

Atas dasar kebijakan tersebut, maka telah dirumuskan strategi sebagai berikut:

- a. Peningkatan sinergitas sumber pembiayaan Program Bangga Kencana antara alokasi APBD Kabupaten Sragen dengan dana transfer DAK Non Fisik BOKB.
- b. Peningkatan kualitas penyusunan rencana kerja BOKB oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen dengan melibatkan Petugas Lapangan (Penyuluh Keluarga Berencana, Petugas Lapangan Keluarga Berencana, PPKBD, Sub-PPKBD), Pengelola Balai Penyuluhan KB, Pokja Kampung KB, dan tim penurunan angka kematian ibu dan *stunting* serta berkoordinasi dengan perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah.
- c. Peningkatan kualitas usulan BOKB TA 2024 oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen melalui Aplikasi Morena dengan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Sragen, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Sragen serta perwakilan BKKBN provinsi Jawa Tengah.
- d. Proses pelaksanaan kegiatan BOKB oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen mengacu pada Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis BOKB Tahun 2024 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- e. Penguatan sinergitas pelaksanaan tugas tim pengendali DAK Kabupaten Sragen perencanaan (termasuk data basis), pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan BOKB serta penyampaian laporan realisasi penyerapan anggaran dan laporan realisasi penggunaan BOKB secara berkala kepada BKKBN melalui Aplikasi Morena dan Kementerian Keuangan melalui Aplikasi Pelaporan DJPK (ALADIN).
- f. Peningkatan pemahaman para pengelola dan tim pengendali DAK Kabupaten Sragen atas petunjuk teknis penggunaan BOKB yang telah ditetapkan, serta pemahaman atas berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pengelolaan BOKB.
- g. Penguatan peran dan fungsi Balai Penyuluhan KB sebagai pusat pengendali operasional Program Bangga Kencana serta penurunan *stunting* di lini lapangan.
- h. Peningkatan koordinasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Sragen, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Sragen serta Badan Pengawas Daerah/Inspektorat Kabupaten Sragen, meliputi perencanaan alokasi, penyaluran, pelaksanaan, dan pelaporan.

## C. Tujuan dan Sasaran

### 1. Tujuan

#### a. Tujuan Umum

Secara umum BOKB bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan guna memberikan dukungan terhadap upaya pencapaian target/sasaran prioritas Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana serta percepatan penurunan *stunting*.

#### b. Tujuan Khusus

Secara khusus, BOKB bertujuan untuk memberikan dukungan dana operasional Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan *stunting*.

### 2. Sasaran

Terlaksananya Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan *stunting* di kabupaten dan kota hingga ke lini lapangan.



## BAB II PELAKSANAAN BOKB

BOKB adalah belanja langsung berupa belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional yang sifatnya mendukung pelayanan publik, terdiri atas:

### A. Balai Penyuluhan KB

#### 1. Operasional Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan

##### a. Definisi

Dukungan Operasional Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan adalah merupakan dukungan biaya yang digunakan untuk mendukung kegiatan Penyuluhan Program Bangga Kencana dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan dengan tujuan dalam rangka meningkatkan capaian Program Bangga Kencana, peningkatan kesertaan ber-KB serta percepatan penurunan *stunting*.

##### b. Rincian Kegiatan

Dukungan Operasional Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan adalah rangkaian kegiatan yang diadakan di Balai Penyuluhan KB atau di luar Balai Penyuluhan KB Kegiatan yang didukung dengan dana BOKB ini dilakukan 11 (sebelas) kali dalam 1 (satu) tahun. Adapun kegiatan yang dilaksanakan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas capaian di wilayah kecamatan masing-masing. Rincian kegiatan yang dilaksanakan antara lain dalam bentuk:

##### 1) Penyuluhan Program Bangga Kencana

Penyuluhan Program Bangga Kencana merupakan kegiatan penyuluhan kepada para calon pengantin/calon pasangan usia subur, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, Keluarga yang memiliki anak 0-24 bulan, 25 – 59 bulan, remaja dan lansia yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap dan perilaku Keluarga dan masyarakat guna mewujudkan Keluarga yang berencana dan Keluarga yang berkualitas serta dalam rangka percepatan penurunan *stunting*. Kegiatan Penyuluhan Program ini dilaksanakan oleh Tenaga Lini Lapangan di Balai Penyuluhan KB (Penyuluh KB, PLKB baik ASN dan/atau Non ASN) sebagai fasilitator dan/atau dapat berkolaborasi dengan pengelola dan pelaksana program yang kompeten serta mitra kerja strategis lainnya.

##### 2) Pembinaan Tenaga Lini Lapangan

Pembinaan Tenaga Lini Lapangan merupakan kegiatan pertemuan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Tenaga Lini Lapangan antara lain: Penyuluh KB, PLKB ASN maupun Non ASN, kader IMP (PPKBD dan Sub-PPKBD) dan Tim Pendamping Keluarga dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu melakukan kegiatan melakukan kegiatan penyuluhan, peningkatan fungsi Keluarga, melakukan

pencatatan dan pelaporan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi pemberian bantuan sosial serta pemantauan pendampingan Keluarga berisiko *stunting*. Topik yang diangkat dalam kegiatan pembinaan Tenaga Lini Lapangan adalah berkaitan dengan peningkatan pelaksanaan Program.

c. Sasaran Kegiatan

Berkaitan dengan fungsi Balai Penyuluhan KB sebagai pusat pengendalian operasional dan pelayanan Program Bangga Kencana di tingkat kecamatan, maka diharapkan adanya kegiatan Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan Program dapat menjangkau sasaran antara lain:

- 1) Sasaran Kegiatan Penyuluhan Program antara lain:
  - a) Remaja;
  - b) Calon pengantin;
  - c) Pasangan Usia Subur;
  - d) Ibu Hamil;
  - e) Ibu Pasca salin/menyusui;
  - f) Keluarga yang memiliki baduta dan balita;
  - g) Keluarga yang memiliki remaja;
  - h) Keluarga yang memiliki lansia;
  - i) Keluarga yang tergabung dalam UPPKA; dan
  - j) Lansia.
- 2) Sasaran kegiatan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan antara lain:
  - a) Penyuluh KB, PLKB ASN dan Non ASN;
  - b) PPKBD;
  - c) Sub-PPKBD;
  - d) Tim Pendamping Keluarga;
  - e) kader Poktan; dan
  - f) mitra lainnya.

d. Lingkup Pembiayaan

Biaya konsumsi, Honor Fasilitator dan Biaya Transportasi/Uang Saku bagi Peserta pada saat pelaksanaan kegiatan secara tatap muka.

e. Output

*Output* dalam penggunaan dukungan operasional Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan adalah:

- 1) Meningkatnya jumlah kader yang mendapatkan pembinaan Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan *stunting*;
- 2) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Tenaga Lini Lapangan dan mitra;
- 3) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Tenaga Lini Lapangan dan mitra terkait pencatatan dan pelaporan Sistem Informasi Keluarga Program Bangga Kencana; dan
- 4) Meningkatnya jumlah Keluarga yang terpapar Program Bangga Kencana.

2. Operasional Pengolahan Data

a. Definisi

Dukungan operasional pengolahan data adalah biaya yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengolahan data Program Bangga Kencana dan/atau data percepatan penurunan *stunting*.

b. Rincian Kegiatan

Kegiatan pengolahan data dilakukan oleh Penyuluh KB, PLKB ASN dan Non ASN dan/atau Tenaga Lini Lapangan yang kompeten yang ditunjuk sebagai pengolah data di Balai Penyuluhan KB, yang mencakup kegiatan mengumpulkan, pengolahan, menganalisis, dan menginterpretasikan data pemantauan sasaran Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan *stunting*.

c. Sasaran Kegiatan

Penyuluh KB, PLKB ASN dan Non ASN, petugas pencatatan dan pelaporan atau Tenaga Lini Lapangan yang kompeten yang ditunjuk sebagai pengolah data di Balai Penyuluhan KB.

d. Lingkup Pembiayaan

Biaya operasional pengolahan data berupa biaya operasional pengolahan data dan/atau Honor Entry Data per orang Rp. 100.000,00 yang dilakukan 12 (dua belas) kali atau bulan dalam 1(satu) tahun.

e. *Output*

- 1) Data register pengendalian lapangan;
- 2) Data register pelayanan kontrasepsi Fasyankes yang belum bisa melakukan input data secara online; dan
- 3) Data dasar Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan *stunting* di Balai Penyuluhan KB.
- 4) Masuk dalam aplikasi Sistem Informasi Keluarga.

3. Dukungan Langgan Daya dan Jasa

Operasional langganan daya dan jasa adalah biaya untuk membayar listrik dan/atau air yang dipergunakan di Balai Penyuluhan KB untuk setiap bulan atau selama 1 tahun (12 bulan).

4. Dukungan Jasa Tenaga Keamanan dan Pramusaji

Operasional Jasa Tenaga Keamanan dan Pramusaji untuk mendukung Kegiatan Program Bangga Kencana, serta biaya yang digunakan untuk 1 (satu) orang tenaga Jasa Keamanan dan 1 (satu) orang Jasa Pramusaji untuk setiap bulan selama 1 tahun (12 bulan) di Balai Penyuluhan KB.

5. Operasional kegiatan konseling Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS/Satyagraha) di Balai Penyuluhan KB

a. Definisi

PPKS/Satyagraha adalah wadah kegiatan terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat, dengan kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan pelayanan Keluarga yang dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi, konsultasi, dan konseling, pembinaan serta rujukan.

b. Rincian Kegiatan

Kegiatan operasional konseling PPKS/Satyagraha ini dilaksanakan minimal 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) tahun,

dengan lingkup kegiatan antara lain:

- 1) Sosialisasi pelayanan PPKS/Satyagatra. Pelayanan di PPKS/Satyagatra meliputi (a) Pelayanan Data dan informasi Kependudukan dan Keluarga; (b) Konsultasi dan Konseling Keluarga Balita dan Anak; (c) Konsultasi dan Konseling Keluarga Remaja dan Remaja; (d) Konsultasi dan Konseling Pra Nikah; (e) Konsultasi dan Konseling Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; (f) Konsultasi dan Konseling Keharmonisan Keluarga; (g) Konsultasi dan Konseling Keluarga Lansia dan Lansia; (h) Pembinaan Usaha Ekonomi Keluarga; (i) Pelayanan Lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan, sumber daya, dan potensi, khususnya dengan 3 (tiga) pelayanan utama dalam rangka percepatan penurunan *stunting*, antara lain: (1) penggunaan Kartu Kembang Anak (KKA) dalam pemantauan tumbuh kembang balita dan anak; (2) persiapan kehidupan berkeluarga bagi calon pengantin; dan (3) pelayanan KB pasca persalinan;
- 2) Konsultasi dan konseling bagi Keluarga yang membutuhkan bantuan konseling di PPKS/Satyagatra yang dapat dilaksanakan antara lain oleh Guru PAUD, Penyuluh KB, PLKB, Genre, atau tenaga lainnya yang kompeten;
- 3) Pendampingan bagi Keluarga yang membutuhkan pelayanan rujukan lebih lanjut.

c. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sasaran sosialisasi pelayanan PPKS/Satyagatra adalah kader-kader yang ada di desa, baik itu kader IMP, kader Poktan BKB, BKR, BKL, UPPKA maupun Tim Pendamping Keluarga yang melaksanakan pendampingan dalam rangka percepatan penurunan *stunting*, serta keluarga berisiko *stunting*. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan oleh Guru PAUD, Penyuluh KB, PLKB, Genre, atau tenaga lainnya yang kompeten dan sudah dilatih;
- 2) Sasaran konsultasi dan konseling adalah Keluarga atau anggota Keluarga yang membutuhkan konseling tentang 8 (delapan) fungsi Keluarga;
- 3) Sasaran pendampingan rujukan adalah Keluarga atau anggota Keluarga yang membutuhkan pelayanan rujukan lebih lanjut dan pelaksana pelayanan teknis PPKS/Satyagatra (konselor) yang mendampinginya.

d. Lingkup Pembiayaan

Lingkup pembiayaan merupakan pembiayaan dalam bentuk operasional yang dapat digunakan untuk:

- 1) Sosialisasi pelayanan PPKS/Satyagatra
  - a) biaya Konsumsi berupa makanan bagi fasilitator, dan/atau makanan yang mengandung protein tinggi (telur, susu, dan sebagainya) bagi keluarga berisiko *stunting*.

- 2) Konsultasi dan konseling
  - a) biaya fasilitator/konselor, berupa uang saku per @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
  - b) konsumsi berupa makanan yang mengandung protein tinggi (telur, susu, dan sebagainya) bagi keluarga berisiko *stunting*, berupa makanan tambahan balita gizi kurang dengan satuan harga per @ Rp16.500,00 (enam belas ribu lima ratus rupiah).
- 3) Pendampingan rujukan bagi Keluarga
  - a) biaya Transportasi bagi Keluarga/anggota Keluarga yang membutuhkan pelayanan rujukan lebih lanjut, berupa uang saku per @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - b) biaya Transportasi konselor yang mendampinginya, berupa uang saku per @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

e. *Output*

*Output* dari kegiatan ini adalah:

- 1) Tersosialisasinya layanan PPKS/Satyagraha Balai Penyuluhan KB; dan
- 2) Keluarga yang mendapatkan pelayanan konsultasi dan konseling di PPKS/Satyagraha.

6. Dukungan Sistem Informasi Keluarga

Dukungan Sistem Informasi Keluarga adalah suatu upaya dalam melaksanakan Sistem Informasi Keluarga berupa seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan Keluarga.

a. Definisi

Dukungan Sistem Informasi Keluarga adalah pembiayaan paket data komunikasi atau pembiayaan sewa internet menggunakan *broadband* di Balai Penyuluhan KB tingkat kecamatan di kabupaten dan kota.

b. Rincian Kegiatan

Kegiatan dukungan SIGA berupa perpanjangan paket data komunikasi atau sewa internet menggunakan *broadband* di Balai Penyuluhan KB tingkat kecamatan di kabupaten dan kota.

c. Lingkup Pembiayaan

Lingkup pembiayaan berupa biaya sewa langganan paket data komunikasi bagi daerah yang terjangkau sinyal di balai penyuluhan tingkat kecamatan untuk setiap bulan selama 1 tahun (12 bulan).

d. Sasaran

Balai Penyuluhan KB dengan sinyal bagus mendapatkan dukungan pembiayaan paket data komunikasi, Balai Penyuluhan KB dengan kategori *poor signal* mendapatkan dukungan sewa langganan internet *broadband*.

e. *Output*

Tersedianya paket data komunikasi dan/atau sewa paket langganan *broadband* pada Balai Penyuluhan KB.

B. Pelayanan KB

1. Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi

a. Definisi

Biaya yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi mencakup kegiatan untuk mendistribusikan Alat dan Obat Kontrasepsi dari gudang PD-KB kabupaten dan kota ke 84 lokasi Fasyankes dan TPMB setara Fasyankes.

b. Rincian Kegiatan

Kegiatan distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi mencakup kegiatan untuk mendistribusikan Alat dan Obat Kontrasepsi dari gudang PD-KB kabupaten dan kota ke 84 lokasi Fasyankes dan TPMB setara Fasyankes.

c. Sasaran Kegiatan

Sasaran operasional distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi tahun 2024 adalah 84 Fasyankes dan TPMB setara Fasyankes yang teregister pada sistem informasi manajemen BKKBN.

d. Lingkup Pembiayaan

- 1) Biaya bahan bakar minyak;
- 2) Biaya Transportasi (sesuai SBM yang berlaku);
- 3) Biaya Konsumsi (sesuai SBM yang berlaku).

Lingkup pembiayaan pada kegiatan distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi dapat dipilih dan disesuaikan dengan kondisi dan peraturan daerah yang berlaku. Frekuensi jadwal distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi disesuaikan dengan pembiayaan yang tersedia.

e. *Output*

*Output* kegiatan ini adalah Fasyankes yang kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsinya terpenuhi.

2. Operasional Koordinasi Pelayanan KB

a. Definisi

Biaya yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pertemuan koordinasi yang dilakukan dengan melibatkan stakeholder dan mitra kerja terkait termasuk organisasi profesi serta kelompok KB pria di tingkat Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan komitmen dalam program KB termasuk pencatatan pelaporannya.

b. Rincian Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan berupa pertemuan koordinasi yang dilakukan dengan melibatkan *stakeholder* dan mitra kerja terkait termasuk organisasi profesi serta kelompok KB pria di tingkat Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan komitmen dalam program KB termasuk pencatatan pelaporannya. Pertemuan koordinasi Pelayanan KB dilaksanakan oleh PD-KB kabupaten/kota minimal sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

- c. Sasaran Kegiatan
 

Sasaran pertemuan koordinasi peningkatan pelayanan KB antara lain:

    - 1) Dinas Pengendalian Penduduk dan KB;
    - 2) Dinas Kesehatan;
    - 3) Pimpinan Fasyankes;
    - 4) Organisasi Profesi (POGI, IBI, IDI, dll);
    - 5) Mitra Kerja Potensial lainnya; dan
    - 6) Kelompok KB Pria.
  - d. Lingkup Pembiayaan
 

Lingkup pembiayaan operasional koordinasi pelayanan KB, antara lain:

    - 1) Biaya Konsumsi pertemuan koordinasi peningkatan pelayanan KB;
    - 2) Biaya Transportasi peserta pertemuan koordinasi peningkatan pelayanan KB; dan/atau
    - 3) Biaya penggantian pulsa/data diberikan jika pertemuan diselenggarakan secara daring.
  - e. *Output*

*Output* kegiatan ini adalah seluruh kabupaten/kota melaksanakan pertemuan koordinasi pelayanan KB, sehingga melalui pertemuan koordinasi didapatkan penguatan komitmen dan rekomendasi dalam upaya mengatasi permasalahan dalam rangka peningkatan pelayanan KB termasuk peningkatan cakupan pencatatan pelaporannya serta penguatan kelompok KB Pria.
3. Operasional Pembinaan Pelayanan KB di Fasyankes
- a. Definisi
 

Merupakan kegiatan pembinaan bagi pengelola program KB di Fasyankes.
  - b. Rincian Kegiatan
 

Operasional Pembinaan Pelayanan KB di Fasyankes dapat digunakan melalui 2 (dua) mekanisme:

    - 1) Pembinaan oleh petugas/pengelola program KB kabupaten/kota dengan melakukan kunjungan langsung ke Fasyankes yang teregistrasi dalam sistem informasi BKKBN; atau
    - 2) Pembinaan yang dilakukan melalui pertemuan di kabupaten/kota dengan menghadirkan Fasyankes dan TPMB setara Fasyankes yang teregistrasi.
  - c. Sasaran Kegiatan
 

Sasaran operasional pembinaan pelayanan KB di Fasyankes adalah Fasyankes dan TPMB setara Fasyankes yang telah teregistrasi dalam sistem informasi manajemen BKKBN.
  - d. Lingkup Pembiayaan
 

Lingkup pembiayaan operasional pembinaan pelayanan KB di Fasyankes disesuaikan dengan mekanisme kegiatan yang dilaksanakan:

    - 1) Biaya Transportasi pembinaan langsung ke Fasyankes dan TPMB setara Fasyankes untuk 1 (satu) orang

petugas/pengelola program KB kabupaten dan kota yang melakukan pembinaan;

- 2) Biaya Transportasi pertemuan pembinaan Fasyankes bagi peserta yang hadir pada pertemuan pembinaan pelayanan KB di Fasyankes;
- 3) Biaya Konsumsi pertemuan pembinaan Fasyankes yang dihadiri peserta dari Fasyankes dan TPMB setara Fasyankes.

Kegiatan pembinaan pelayanan KB di Fasyankes dapat dipilih dan disesuaikan dengan kondisi daerah serta disesuaikan dengan pembiayaan yang tersedia.

e. *Output*

*Output* dukungan operasional pembinaan pelayanan KB di Fasyankes tahun 2024 adalah jumlah Fasyankes dan TPMB setara Fasyankes yang dilakukan pembinaan oleh PD-KB kabupaten dan kota. Pembinaan dilakukan untuk melakukan identifikasi kendala yang dihadapi Fasyankes dan TPMB setara Fasyankes dalam upaya peningkatan pelayanan KB serta peningkatan cakupan pencatan dan pelaporannya. Apabila terdapat kendala maka dapat segera ditindaklanjuti, sehingga pelayanan KB di Fasyankes dan TPMB setara Fasyankes meningkat dan target program kabupaten/kota dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

4. Operasional Penggerakan Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

a. Operasional Penggerakan Pelayanan KB IUD

1) Definisi

Operasional penggerakan pelayanan KB IUD adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Lini Lapangan kepada calon peserta KB ataupun peserta KB agar bersedia datang ke tempat pelayanan KB serta mendapat pelayanan IUD.

2) Rincian Kegiatan

Pemberian pelayanan pemasangan IUD oleh dokter/bidan kompeten.

3) Sasaran Kegiatan

Pasangan usia subur yang akan dilayani IUD.

4) Lingkup Pembiayaan

Pembiayaan operasional penggerakan pelayanan KB IUD terdiri atas:

a) Biaya Layanan Penggerakan KB IUD

Biaya layanan penggerakan KB IUD tidak boleh melebihi harga satuan yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp329.000,00

Biaya layanan penggerakan KB IUD merupakan komponen yang terdiri atas Biaya Medis dan pembiayaan lainnya yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing kabupaten dan kota. Biaya Medis diberikan kepada Fasyankes milik pemerintah atau swasta atau TPMB atau tenaga medis/tenaga



kesehatan yang memberikan pelayanan IUD sebesar Rp100.000,00 per peserta KB sesuai standar biaya non kapitasi pelayanan KB pada BPJS kesehatan.

Komponen Pembiayaan lainnya yang dapat dipilih pada biaya layanan penggerakan IUD terdiri atas:

- (1) Belanja makan dan minum (konsumsi) untuk calon peserta KB atau peserta KB, petugas pendukung kegiatan pelayanan, dan/atau Tenaga Lini Lapangan;
- (2) Biaya Transportasi dapat diberikan untuk:
  - (a) calon peserta KB atau peserta KB yang datang ke Fasyankes; dan/atau
  - (b) petugas pendukung kegiatan pelayanan dan/atau Tenaga Lini Lapangan yang melakukan penggerakan dan membawa akseptor ke Fasyankes.
- (3) Biaya Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sudah termasuk atau memasukkan pada Biaya Medis dalam pelayanan KB IUD;

5) *Output*

Peserta KB IUD.

b. Operasional Penggerakan Pelayanan KB Implan

1) Definisi

Operasional penggerakan pelayanan KB Implan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Lini Lapangan kepada calon peserta KB ataupun peserta KB agar bersedia datang ke tempat pelayanan KB serta mendapat pelayanan Implan.

2) Rincian Kegiatan

Pemberian pelayanan pemasangan Implan oleh dokter/bidan kompeten.

3) Sasaran Kegiatan

Pasangan usia subur yang akan dilayani kontrasepsi Implan.

4) Lingkup Pembiayaan

Pembiayaan dana BOKB Penggerakan Pelayanan KB Implan terdiri atas:

a) Biaya Layanan Penggerakan KB Implan

Biaya layanan penggerakan KB Implan tidak boleh melebihi harga satuan yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp314.000,00

Apabila peserta KB melakukan pencabutan dan pemasangan Implan dalam satu waktu, maka Biaya Medisnya dapat dibayarkan 2 (dua) kali yaitu biaya dari sub menu penggerakan pelayanan KB implan dan/atau pencabutan implan namun komponen biaya lainnya hanya dibayarkan 1 (satu) kali yang bersumber dari salah satu submenu tersebut.

Biaya layanan penggerakan KB Implan merupakan komponen yang terdiri atas Biaya Medis dan

pembiayaan lainnya yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing kabupaten dan kota. Biaya Medis diberikan kepada Fasyankes milik pemerintah atau swasta atau TPMB atau tenaga medis/tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan Implan sebesar Rp 100.000,00 per peserta KB sesuai standar biaya non kapitasi pelayanan KB pada BPJS kesehatan.

Komponen Pembiayaan lainnya yang dapat dipilih pada biaya layanan penggerakan Implan terdiri atas:

- (1) Belanja makan dan minum (konsumsi) untuk calon peserta KB atau peserta KB, petugas pendukung kegiatan pelayanan, dan/atau Tenaga Lini Lapangan;
- (2) Biaya Transportasi dapat diberikan untuk:
  - (a) Calon peserta KB atau peserta KB yang datang ke Fasyankes; dan/atau
  - (b) Petugas pendukung kegiatan pelayanan dan/atau Tenaga Lini Lapangan yang melakukan penggerakan dan membawa calon peserta KB atau peserta KB ke Fasyankes.
- (3) Biaya Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sudah termasuk atau memasukkan pada Biaya Medis dalam pelayanan KB Implan;

5) *Output*

Peserta KB Implan.

c. Operasional Penggerakan Pelayanan KB MOW

1) Definisi

Operasional penggerakan pelayanan KB MOW adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Lini Lapangan kepada calon peserta KB ataupun peserta KB agar bersedia datang ke tempat pelayanan KB serta mendapat pelayanan MOW.

2) Rincian Kegiatan

Pemberian pelayanan KB MOW oleh dokter kompeten.

3) Sasaran Kegiatan

Pasangan usia subur yang akan dilayani kontrasepsi MOW.

4) Lingkup Pembiayaan

Pembiayaan dana BOKB Penggerakan Pelayanan KB MOW terdiri atas:

a) Biaya Layanan Penggerakan KB MOW

Biaya layanan penggerakan KB MOW tidak boleh melebihi harga satuan yang ditetapkan sebesar Rp3.830.000,00.

Biaya layanan penggerakan KB MOW merupakan komponen pembiayaan yang digunakan untuk memberikan pelayanan MOW di Fasyankes Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) dengan komponen pembiayaan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing kabupaten dan kota. Biaya pengganti tidak bekerja merupakan komponen pembiayaan yang wajib

disediakan dan diberikan kepada akseptor KB MOW.

Pelayanan MOW satu paket dengan pelayanan *sectio caesarea* yang dibiayai melalui BPJS Kesehatan, Biaya Medis MOW tidak dapat dibayarkan menggunakan dana BOKB. Pembayaran Biaya Medis MOW harus dapat dipastikan tidak terjadi pembiayaan ganda (*double claim*) dengan pembiayaan dari sumber lainnya.

Komponen pembiayaan yang dapat dipilih pada biaya layanan penggerakan MOW terdiri atas:

- (1) Biaya Medis diberikan kepada Fasyankes atau tenaga medis/tenaga kesehatan pemberi Pelayanan KB sesuai dengan peraturan standar Biaya Medis yang berlaku dan tidak melebihi besaran maksimal biaya penggerakan pelayanan MOW;
- (2) Belanja makan dan minum (konsumsi) untuk calon peserta KB atau peserta KB, petugas pendukung kegiatan pelayanan, dan/atau Tenaga Lini Lapangan;
- (3) Biaya Transportasi dapat diberikan untuk:
  - (a) Calon peserta KB atau peserta KB yang datang ke Fasyankes;
  - (b) Petugas pendukung kegiatan pelayanan dan/atau pendamping calon peserta KB dan/atau Tenaga Lini Lapangan yang melakukan penggerakan dan/atau membawa peserta KB ke Fasyankes; dan/atau
  - (c) Membawa calon peserta KB MOW ke Fasyankes di luar wilayah Kabupaten/Kota setempat. Besaran nilai yang digunakan sesuai dengan ketersediaan dana yang ada dan *at cost*.
- (4) Pengganti tidak bekerja diberikan kepada peserta KB MOW sebesar Rp. 300.000,-per peserta KB MOW. Besaran biaya pengganti tidak bekerja mengacu pada Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan merupakan satuan biaya tertinggi yang dapat diberikan.
- (5) Biaya Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sudah termasuk atau memasukkan pada Biaya Medis dalam pelayanan KB MOW;
- (6) Biaya Alat Pelindung Diri (APD) Biaya penyediaan APD diperuntukkan kepada provider yang memberikan pelayanan KB MOW. Penyediaan APD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Biaya pemeriksaan deteksi dini Covid-19 dapat diberikan kepada calon peserta KB dan/atau provider yang memberikan pelayanan MOW. Penyediaan pemeriksaan deteksi dini Covid-19

disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan kondisi daerah setempat.

5) *Output*

Peserta KB MOW.

d. Operasional Penggerakan Pelayanan KB MOP

1) Definisi

Operasional penggerakan pelayanan KB MOP adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Lini Lapangan kepada calon peserta KB ataupun peserta KB agar bersedia datang ke tempat pelayanan KB serta mendapat pelayanan MOP.

2) Rincian Kegiatan

Pemberian pelayanan MOP oleh dokter kompeten.

3) Sasaran Kegiatan

Pasangan usia subur yang akan dilayani kontrasepsi MOP.

4) Lingkup Pembiayaan

Pembiayaan dana BOKB Penggerakan Pelayanan KB MOP terdiri atas:

a) Biaya Layanan Penggerakan KB MOP

Biaya layanan penggerakan KB MOP tidak boleh melebihi harga satuan yang ditetapkan sebesar Rp1.577.000,00.

Biaya layanan penggerakan KB MOP merupakan komponen pembiayaan yang digunakan untuk memberikan pelayanan MOP di Fasyankes dengan komponen pembiayaan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing kabupaten dan kota. Biaya pengganti tidak bekerja merupakan komponen pembiayaan yang wajib disediakan dan diberikan kepada akseptor KB MOP.

Komponen pembiayaan yang dapat dipilih pada biaya layanan penggerakan MOP terdiri atas:

- (1) Biaya Medis diberikan kepada Fasyankes atau tenaga medis/tenaga kesehatan pemberi Pelayanan KB sesuai dengan peraturan standar Biaya Medis yang berlaku dan tidak melebihi besaran maksimal biaya penggerakan pelayanan MOP;
- (2) Belanja makan dan minum (konsumsi) untuk calon peserta KB atau peserta KB, petugas pendukung kegiatan pelayanan, dan/atau Tenaga Lini Lapangan;
- (3) Biaya Transportasi dapat diberikan untuk:
  - (a) Calon peserta KB yang datang ke Fasyankes;
  - (b) Petugas pendukung kegiatan pelayanan dan/atau pendamping calon peserta KB dan/atau Tenaga Lini Lapangan yang melakukan penggerakan dan/atau membawa peserta KB ke Fasyankes; dan/atau
  - (c) Membawa calon peserta KB MOP ke Fasyankes di luar wilayah Kabupaten/Kota

setempat. Besaran nilai yang digunakan sesuai dengan ketersediaan dana yang ada dan *at cost*.

(4) Pengganti tidak bekerja diberikan kepada peserta KB MOP. Besaran biaya pengganti tidak bekerja mengacu pada Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan merupakan satuan biaya tertinggi yang dapat diberikan.

(1) Biaya Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sudah termasuk atau memasukkan pada Biaya Medis dalam pelayanan KB MOP;

(2) Biaya pemeriksaan deteksi dini Covid-19 dapat diberikan kepada peserta KB dan/atau provider yang memberikan pelayanan MOP. Penyediaan pemeriksaan deteksi dini Covid-19 disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan kondisi daerah setempat.

5) *Output*  
Peserta KB MOP.

e. Operasional Pencabutan Implan

1) Definisi

Operasional pencabutan Implan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Lini Lapangan kepada peserta KB implan agar bersedia dihadirkan ke tempat pelayanan KB serta mendapat pelayanan cabut Implan.

2) Rincian Kegiatan

Pemberian pelayanan pencabutan Implan oleh dokter/bidan kompeten.

3) Sasaran Kegiatan

Pasangan Usia Subur yang akan dilayani pencabutan Implan, dengan ketentuan:

a) telah habis masa pakai implannya;

b) ingin berganti cara ke metode kontrasepsi jangka panjang lainnya;

c) mengalami efek samping/komplikasi dari pemakaian implant sebelumnya;

d) mengalami kegagalan pemakaian kontrasepsi implan (hamil saat masih menggunakan kontrasepsi implan).

4) Lingkup Pembiayaan

Pembiayaan dana BOKB Pencabutan Implan terdiri atas Biaya Layanan Pencabutan Implan.

Biaya layanan pencabutan Implan tidak boleh melebihi harga satuan yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp346.000,00. Apabila peserta KB melakukan pencabutan dan pemasangan Implan dalam satu waktu, maka Biaya Medisnya dapat dibayarkan 2 (dua) kali yaitu biaya dari sub menu pergerakan pelayanan KB implan dan/atau

pencabutan implan namun komponen biaya lainnya hanya dibayarkan 1 (satu) kali yang bersumber dari salah satu submenu tersebut.

Biaya layanan pencabutan Implan merupakan komponen yang terdiri atas Biaya Medis dan pembiayaan lainnya yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing kabupaten dan kota. Biaya Medis diberikan kepada Fasyankes milik pemerintah atau swasta atau TPMB atau tenaga medis/tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan pencabutan Implan sebesar Rp100.000,00 per peserta KB sesuai standar biaya non kapitasi pelayanan KB pada BPJS kesehatan.

Komponen Pembiayaan lainnya yang dapat dipilih pada biaya layanan penggerakan Implan terdiri atas:

- a) Belanja makan dan minum (konsumsi) untuk peserta KB, petugas pendukung kegiatan pelayanan, dan/atau Tenaga Lini Lapangan.
- b) Biaya Transportasi dapat diberikan untuk:
  - (1) Peserta KB yang datang ke Fasyankes; dan/atau
  - (2) Petugas pendukung kegiatan pelayanan dan/atau Tenaga Lini Lapangan yang melakukan penggerakan dan membawa peserta KB ke Fasyankes.
  - (3) Biaya Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sudah termasuk atau memasukkan pada Biaya Medis dalam pelayanan KB Implan;

5) *Output*

Peserta KB Cabut Implan.

5. Operasional Registrasi dan Register Pelayanan Keluarga Berencana di Fasyankes

a. Definisi

Operasional Registrasi dan Register Pelayanan Keluarga Berencana di Fasyankes adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan pelayanan KB di Fasyankes.

b. Rincian Kegiatan

Kegiatan Registrasi dan Register Pelayanan KB di Fasyankes yang dilakukan secara rutin setiap bulan sekali (12 kali) dalam 1 tahun oleh Tenaga Pencatatan dan Pelaporan termasuk untuk input data dan/atau pengiriman form registrasi dan register Fasyankes dan jejaring yang ada di bawahnya (K/0/KB/20, R/1/KB/20 dan R/II/KB/20) yang bersifat by name by address yang datanya harus dijaga kerahasiaannya.

c. Sasaran Kegiatan

Petugas Pencatatan dan Pelaporan di Fasyankes.

d. Lingkup Pembiayaan

Biaya operasional pengolahan Fasyankes dan/atau Honor Entry Data per orang Rp100.000,00 yang dilakukan 12 (dua belas) kali atau bulan dalam 1(satu) tahun.

e. *Output*

- 1) Fasyankes yang teregister;

2) Pencatatan dan Pelaporan di Fasyankes yang update.

### C. Penggerakan di Kampung KB

Operasional Penggerakan di Kampung KB diberikan untuk mendukung Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung KB. Kampung KB yang dibiayai: terdaftar di *website* Kampung KB dan K/0 Sistem Informasi Keluarga; Kampung KB yang telah terbentuk sebelum tahun 2024; Kampung KB diutamakan dengan klasifikasi berkembang, mandiri, dan berkelanjutan.

#### 1. Pembekalan Pokja Kampung KB

##### a. Definisi

Pembekalan Pokja Kampung KB adalah kegiatan yang dilakukan oleh PD-KB yang bertujuan untuk memberikan orientasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas bagi Pokja dan pendamping program di tingkat desa/kelurahan.

##### b. Rincian Kegiatan

Pemberian materi dan praktek pengelolaan Kampung KB dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

##### c. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan adalah satu tim pengelola Kampung KB, terdiri atas 7 (tujuh) orang dari masing-masing Kampung KB terdiri atas:

- 1) 1 (satu) orang ketua Pokja Kampung KB;
- 2) 4 (empat) orang anggota Pokja yang mewakili masing-masing seksi;
- 3) 1 (satu) orang Penyuluh KB, PLKB ASN atau Non ASN;
- 4) 1 (satu) orang aparat desa.

##### d. Lingkup Pembiayaan

Pembiayaan operasional pembekalan Pokja Kampung KB diberikan dalam bentuk biaya fasilitator, konsumsi, dan/atau transportasi pada pelaksanaan kegiatan secara tatap muka.

##### e. *Output*

*Output* dalam penggunaan bantuan operasional pembekalan Pokja Kampung KB adalah Pokja yang terlatih.

#### 2. Pertemuan Pokja Kampung KB

##### a. Definisi

Pertemuan Pokja Kampung KB adalah pertemuan yang diikuti oleh ketua dan anggota Pokja, beserta tim penggerak lainnya untuk sebagai rangkaian pengelolaan Kampung KB.

##### b. Rincian Kegiatan

Pertemuan Pokja Kampung KB yang didukung dengan dana BOKB dilakukan minimal 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

##### 1) Pengumpulan dan analisis data

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pokja Kampung KB/kader/kader Rumah Data yang bertujuan untuk mengumpulkan data baik secara primer (langsung) ataupun sekunder (memanfaatkan data yang tersedia) yang selanjutnya perlu dilakukan analisis dalam rangka pemetaan masalah dan potensi Kampung KB.

Adapun data yang dikumpulkan terkait dengan data kuantitas penduduk, data kualitas penduduk, data mobilitas penduduk, data pembangunan Keluarga, data kasus stunting, data Keluarga risiko stunting, data cakupan administrasi, data perlindungan sosial, data potensi desa/kelurahan dan data lain sesuai dengan kebutuhan.

2) Penyusunan rencana kerja

Setelah pengumpulan data dan memetakan potensi dan masalah, maka Pokja menyusun Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dengan mempertimbangkan prioritas pengentasan masalah dengan memberdayakan segala potensi internal dan mengoptimalkan jejaring. Untuk selanjutnya RKM perlu diketahui oleh pemerintah desa/kelurahan agar bersinergi dengan program pembangunan desa/kelurahan. RKM perlu disampaikan kepada PD-KB kabupaten dan kota melalui Pembina Kampung KB yaitu Penyuluh KB, PLKB sebagai bahan dalam advokasi dengan lintas sektor yang dapat berkontribusi di Kampung KB.

3) Pencatatan dan Pelaporan kegiatan

Pencatatan dan penyusunan laporan dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Pokja melalui website <https://kampungkb.bkkbn.go.id/> memuat tentang profil Kampung KB, profil penduduk, kegiatan, serta capaian program.

4) Monitoring rencana kerja dan capaian program

Monitoring pelaksanaan rencana kerja dan capaian program dilakukan oleh Penyuluh KB beserta Pokja Kampung KB. Monitoring ditujukan untuk memperoleh fakta, data, dan informasi tentang pelaksanaan dan capaian program di Kampung KB. Selanjutnya hasil monitoring perlu ditindak lanjuti dengan perbaikan pelaksanaan kegiatan dan program.

c. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan dalam penggunaan bantuan operasional pertemuan Pokja Kampung KB adalah:

- 1) Pokja Kampung KB;
- 2) Penyuluh KB, PLKB ASN dan Non ASN;
- 3) PPKBD;
- 4) Sub-PPKBD;
- 5) Kader Poktan;
- 6) Pengurus Rumah Data Kependudukan; dan
- 7) Pengelola Dapur Sehat Atasi Stunting.

d. Lingkup Pembiayaan

Pembiayaan operasional Pokja Kampung KB diberikan dalam bentuk konsumsi dan/atau transpor pada pelaksanaan kegiatan secara tatap muka.



e. *Output*

*Output* dalam penggunaan bantuan operasional pertemuan Pokja Kampung KB, adalah:

- 1) RKM; dan
- 2) Laporan dalam *website* Kampung KB.

3. Operasional Ketahanan Keluarga Poktan

a. Definisi

Operasional ketahanan Keluarga Poktan adalah biaya untuk pelaksanaan kegiatan di poktan Program Bangga Kencana dalam upaya peningkatan ketahanan Keluarga dan percepatan capaian program prioritas nasional.

b. Rincian Kegiatan

Kegiatan berupa orientasi teknis, diskusi, tanya jawab, sosialisasi, dan seterusnya yang berdampak kepada peningkatan ketahanan Keluarga. Orientasi teknis Ketahanan Keluarga berbasis Poktan adalah kegiatan yang bertujuan memberikan informasi pemahaman dan ketrampilan kepada peserta kegiatan dalam rangka meningkatkan ketahanan Keluarga. Operasional ketahanan Keluarga dilakukan dengan topik pembahasan yang disesuaikan pada kondisi dan kebutuhan di Kampung KB. Berikut tema yang dapat dipilih dan dilaksanakan di Kampung KB berbasis Poktan Program Bangga Kencana:

- 1) Pengelolaan Dapur Sehat Atasi *Stunting*;
- 2) Kebutuhan dan kecukupan gizi, pengasuhan, dan pembinaan tumbuh kembang anak;
- 3) Pemberian pengetahuan dan keterampilan dalam pengasuhan dan pembinaan remaja;
- 4) Penyiapan diri remaja untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, berkualitas dalam upaya penyiapan perencanaan kehidupan berkeluarga dan generasi berkualitas;
- 5) Kelompok BKL mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang;
- 6) Pembinaan pemberdayaan ekonomi Keluarga dalam upaya perwujudan kemandirian ekonomi;
- 7) Orientasi pengelolaan Rumah Data;
- 8) Edukasi kependudukan di tingkat desa/kelurahan;
- 9) Penguatan KIE dan pembinaan kesertaan KB pria melalui kelompok dan motivator KB Pria; dan
- 10) KIE pemberdayaan dan perlindungan Keluarga.

c. Sasaran Kegiatan

- 1) Keluarga yang mempunyai balita;
- 2) Ibu hamil dan menyusui;
- 3) Keluarga yang mempunyai remaja usia 10-24 tahun yang belum menikah;
- 4) Remaja dengan usia 10-24 tahun yang belum menikah;
- 5) Lansia dan Keluarga yang mempunyai lansia;
- 6) Kelompok KB dan motivator pengguna kontrasepsi;

- 7) Kader;
- 8) Penyuluh KB, PLKB; dan
- 9) Pengelola Dapur Sehat atasi *Stunting*.
- d. Lingkup Pembiayaan
 

Pembiayaan operasional ketahanan Keluarga Poktan diberikan dalam bentuk biaya penunjang pelaksanaan kegiatan berbasis Poktan, konsumsi dan/atau transportasi pada pelaksanaan kegiatan secara tatap muka.
- e. *Output*

Meningkatnya partisipasi Keluarga atau anggota Keluarga yang merupakan sasaran Program Bangga Kencana dalam kegiatan Poktan.
- 4. Operasional Penguatan Kampung KB di tingkat kabupaten dan kota
  - a. Definisi
 

Operasional penguatan Kampung KB di tingkat kabupaten dan kota adalah biaya untuk pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Kampung KB secara konvergen dan terintegrasi antar lintas sektor.
  - b. Rincian Kegiatan
 

Kegiatan dapat berupa pertemuan yang bertujuan untuk analisis situasi, penentuan prioritas garapan, perencanaan intervensi bersama, monitoring, serta evaluasi penyelenggaraan Kampung KB. Operasional penguatan Kampung KB di tingkat kabupaten dan kota dengan topik:

    - 1) Pembahasan tentang hasil analisis situasi. Setiap dinas/badan menyiapkan tentang hasil analisis situasi terkait dengan capaian program yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Pada pertemuan kali ini diharapkan akan keluar prioritas masalah yang akan diintervensi bersama oleh lintas sektor untuk mencapai Keluarga berkualitas;
    - 2) Pembahasan tentang rencana intervensi bersama. Berdasarkan hasil analisis situasi dan penentuan prioritas masalah, perlu disusun rencana intervensi bersama, pembagian tugas, dan mekanisme pelaksanaan teknis di Kampung KB;
    - 3) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Kampung KB. Pada bagian ini akan dibahas tentang capaian penyelenggaraan Kampung KB dengan mengacu kepada indikator input, proses, *output*, dan dampak penyelenggaraan Kampung KB.
  - c. Sasaran Kegiatan
    - a) Pimpinan Daerah;
    - b) Sekretaris Daerah;
    - c) Bappeda kabupaten dan kota;
    - d) PD yang menangani urusan KB di kabupaten/kota;
    - e) Dinas/badan yang merupakan perpanjangan urusan dari kementerian yang tertuang dalam Instruksi Presiden

Nomor 3 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;

- f) Dinas/badan lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan Kampung KB;
  - g) Pihak swasta dan pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan Kampung KB.
- d. Lingkup Pembiayaan
- Operasional penguatan Kampung KB di tingkat kabupaten dan kota diberikan dalam bentuk Biaya Transportasi dan Biaya Konsumsi. Pada pelaksanaan kegiatan secara tatap muka.
- e. *Output*
- Terselenggaranya konvergensi program di Kampung KB.

#### D. Penurunan *Stunting*

##### 1. Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit *Stunting*

- a. Definisi

BKB Kit *Stunting* merupakan sarana/alat bantu penyuluhan yang berupa seperangkat alat permainan edukatif dan media berisi materi yang dipergunakan kader untuk memberikan penyuluhan kepada Keluarga yang memiliki ibu hamil dan baduta agar meningkatkan penerapan pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk menurunkan prevalensi *stunting*.

- b. Rincian Kegiatan

Pengadaan sarana BKB Kit *Stunting* untuk mendukung pelaksanaan kelas pengasuhan pada Kelompok BKB.

- c. Sasaran Kegiatan

  - (1) Kelompok BKB yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (bupati/walikota, camat) atau oleh Pemerintah Desa (kepala desa/lurah)
  - (2) Penerima BKB Kit *Stunting* wajib melampirkan dokumen SK pembentukan BKB yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang minimal oleh Pemerintah Desa.

- d. Lingkup Pembiayaan

Lingkup Pembiayaan dipergunakan untuk pengadaan seperangkat BKB Kit *Stunting* sebanyak 25 unit/Desa Lokus, dengan hars sebesar Rp12.000.000.00 , terdiri atas materi dan media yang meliputi:

  - 1) Media bahan penyuluhan yang terdiri atas:
    - a) Buku Menjadi Orang Tua Hebat dalam mengasuh Anak yang terdiri atas 4 seri;
    - b) Buku Pengasuhan Anak yang berkebutuhan khusus
    - c) Buku Saku "Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan";
    - d) Media Lembar Balik untuk penyuluhan stimulasi anak usia 0-23 bulan yang terdiri atas: 0 – 12 bulan dan 13 – 24 bulan;
    - e) Modul BKB Holistik Integratif;
    - f) Modul BKB Eliminasi Masalah Anak *Stunting* (EMAS).

- 2) Alat Pantau Tumbuh Kembang Anak terdiri atas:
  - a) Kalender Pengasuhan 1000 HPK yang terdiri atas 3 bagian:
    - i. Kalender Pengasuhan Ibu Hamil;
    - ii. Kalender Pengasuhan Anak Usia 0-12 bulan;
    - iii. Kalender Pengasuhan Anak Usia 13-24 bulan.
  - b) KKA;
  - c) Poster Pintar.
- 3) Alat Permainan Edukatif (APE) yang terdiri atas:
  - a) APE motorik kasar;
  - b) Kubus Susun Edukasi;
  - c) APE Pengenalan Huruf dan Angka;
  - d) Buku Kain Stimulasi;
  - e) APE Pesan Kunci 8 (delapan) Fungsi Keluarga;
  - f) Ular Tangga “BKB Emas”.
- 4) Kelengkapan
  - a) Tas Jinjing Ular Tangga BKB EMAS;
  - b) Tas penyimpanan APE dan buku, alat pantau tumbuh kembang anak, media penyuluhan bagi orang tua;
  - c) Kardus BKB Kit *Stunting*.

e. *Output*

Terdistribusikannya sarana BKB Kit *Stunting* untuk kelompok BKB.

2. Operasional Pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting*

a. Definisi

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga untuk memantau perkembangan dan melakukan pendampingan kepada Calon Pengantin/calon Pasangan Usia Subur (catin/caPUS), ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0-24 bulan. Kegiatan pemantauan kepada sasaran sebagaimana dimaksud di atas sebagai upaya mendeteksi dini faktor-faktor risiko *stunting* serta memfasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial kepada sasaran prioritas percepatan penurunan *stunting* sesuai dengan kebutuhan sehingga terwujudnya 4 (empat) PASTI: (1) Memastikan semua sasaran terdata; (2) Memastikan semua sasaran memperoleh pelayanan; (3) Memastikan semua sasaran memanfaatkan intervensi dari pelayanan; dan (4) Memastikan semua pelaksanaan dan pendampingan tercatat dan dilaporkan.

b. Rincian Kegiatan

Dukungan operasional Pendampingan Sasaran Calon Pengantin (catin), Keluarga Berisiko *Stunting*, dan Balita merupakan dukungan pembiayaan operasional yang diberikan kepada Tim Pendamping Keluarga sesuai dengan jumlah Tim Pendamping Keluarga di wilayahnya dalam melakukan kegiatan perencanaan dan pendampingan kepada sasaran Catin, Keluarga berisiko *stunting* dan Balita. Pelaksanaan pendampingan tersebut dapat dilakukan 1 (satu) orang atau secara individu sebagai bagian dari Personil Tim

Pendamping Keluarga maupun pendampingan secara kelompok (seluruh Tim Pendamping Keluarga melakukan pendampingan bersamaan kepada sasaran). Adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan antara lain:

1) Daftar Inventaris Sasaran Pendampingan

Untuk persiapan melakukan pendampingan kepada sasaran, Tim Pendamping Keluarga harus memiliki daftar inventaris sasaran pendampingan yang secara periodik dimutakhirkan dan diverifikasi. Daftar Inventaris Sasaran Pendampingan terdiri atas: Data sasaran Keluarga berisiko stunting (ibu hamil, ibu pasca salin, baduta dan balita) dan data Catin. Daftar inventaris sasaran Keluarga berisiko stunting Tim Pendamping Keluarga dapat diperoleh dari berbagai sumber antara lain:

- a) Data Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 atau data pemutakhiran data Tahun 2022;
- b) Data yang bersumber dari kecamatan atau dari PD-KB;
- c) Data dapat bersumber juga dari desa/kelurahan atau lingkungan kediaman sasaran/kediaman Calon Pengantin (RT/RW);
- d) KUA/Lembaga Agama/lembaga perizinan pernikahan lainnya;
- e) TPPS tingkat desa/kelurahan;
- f) Data catin yang telah melakukan register melalui aplikasi;
- g) Data dapat bersumber juga dari jejaring PKK; dan/atau
- h) Data dapat bersumber dari lainnya.

2) Pelaksanaan Pendampingan

a) Pelaksanaan pendampingan catin/caPUS Merupakan prosesfasilitasi dan edukasi yang ditindaklanjuti dengan treatment dan upaya-upaya kesehatan dan peningkatan status gizi sebagai upaya pencegahan *stunting* bagi catin/calon pasangan usia subur (caPUS). Pelaksanaan pendampingan bagi catin/caPUS dilakukan minimal 2 (dua) kali pada setiap catin/caPUS dalam kurun waktu ideal 3 (tiga) bulan sebelum menikah. Dalam tugas pendampingan, tim pendamping menyampaikan kepada catin yang akan menikah sebagai berikut:

- Menginformasikan dan memastikan catin/caPUS mendaftarkan pernikahan paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelum menikah;
- Menginformasikan dan memastikan catin/caPUS melakukan registrasi di Aplikasi Pendampingan Keluarga;
- Menghubungkan catin/caPUS kepada fasilitas kesehatan dan memastikan untuk mendapatkan fasilitasi dalam melakukan *treatment*

(perawatan/penanganan) pencegahan *stunting* seperti suplemen untuk meningkatkan status gizi dalam mempersiapkan kehamilan yang sehat;

- Menginformasikan dan memastikan catin/caPUS mengikuti kelas dan/atau mendapatkan materi bimbingan perkawinan di institusi agamanya masing-masing (untuk mendapatkan informasi tentang KB, Pengasuhan 1000 HPK, dll);
- Melakukan KIE dan memastikan PUS baru yang belum/ tidak layak hamil untuk menunda kehamilan dengan kontrasepsi yang sesuai atau dibawah pengawasan petugas kesehatan; dan
- Melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan pendampingan catin/caPUS (bisa dilakukan secara manual atau melalui aplikasi).

b) Pelaksanaan pendampingan ibu hamil

Merupakan kegiatan pendampingan yang dilakukan untuk memantau perkembangan kehamilan dan mendeteksi secara dini apabila muncul ketidaksesuaian perkembangan berdasarkan buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) untuk segera dilakukan penanganan, agar ibu hamil mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas, serta terhindar dari risiko *stunting*. Pelaksanaan pendampingan kepada ibu hamil dapat dilaksanakan sesuai dengan usia kehamilan dan kondisi sasaran ibu hamil antara lain yaitu 1 (satu) kali pada trimester 1 (satu), 2 (dua) kali pada trimester kedua dan 3 (tiga) kali pendampingan pada trimester, atau dapat dilakukan pendampingan lebih intensif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan ibu hamil. Pada saat kunjungan, Tim Pendamping Keluarga memastikan ibu hamil melaksanakan rekomendasi tenaga kesehatan sesuai buku KIA, ibu hamil mendapatkan KIE kehamilan sehat, asupan gizi seimbang, dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta ibu hamil mendapatkan KIE kesehatan reproduksi pasca persalinan.

c) Pelaksanaan pendampingan pasca persalinan

Merupakan kegiatan pendampingan kepada ibu hamil yang akan melahirkan sampai dengan pasca persalinan untuk memberikan promosi dan KIE tentang KB pasca persalinan, memantau kesehatan ibu nifas dan perawatan bayi, promosi, dan KIE tentang Asi Eksklusif, gizi seimbang, dan 1000 HPK. Tim Pendamping Keluarga pada saat melakukan kunjungan memastikan ibu pasca persalinan menggunakan alat kontrasepsi terpilih dalam jangka

waktu sampai 42 (empat puluh dua) hari setelah melahirkan sehingga memiliki jarak ideal dengan kehamilan berikutnya diharapkan sebelum masa nifas selesai sudah menggunakan KB Pasca Persalinan. Dalam pendampingan ibu pasca persalinan berisiko, Tim Pendamping Keluarga berkoordinasi dengan tenaga kesehatan, perangkat desa, pendamping Keluarga harapan, dan pihak lainnya.

d) Pelaksanaan pendampingan Keluarga anak usia 0-23 bulan

Pendampingan Keluarga dengan anak usia 0-23 bulan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi KIE/Penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan kesehatan dan fasilitasi pemberian bantuan sosial yang dilakukan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan stunting bagi anak usia 0-23 bulan. Pelaksanaan pendampingan bagi anak usia 0-23 bulan mulai dari kunjungan bayi baru lahir (0 bulan) yang diikuti kunjungan bulanan (satu kali setiap bulan) hingga anak berusia 23 (dua puluh tiga) bulan, utamanya untuk anak 0-23 bulan dengan risiko stunting. Dalam tugas pendampingan, Tim Pendamping Keluarga memberikan promosi dan KIE terkait Perawatan bayi baru lahir, Inisiasi Menyusui Dini, Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, Imunisasi, Makanan Pendamping ASI (MP ASI), Pemberian ASI sampai dengan 2 (dua) tahun), PHBS, Vitamin A, Obat Cacing, Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan rutin setiap bulan di Posyandu, stimulasi perkembangan, pola asuh, Tanda Anak sehat, Tanda bahaya pada Anak usia 0-23 bulan, serta pemberian KIE bagi orangtua yang belum menggunakan kontrasepsi dan memastikan untuk memberikan edukasi untuk menggunakan kontrasepsi sampai dengan anak usia 23 bulan. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga pada sasaran ini antara lain:

- Pendampingan anak usia 0-23 bulan dengan riwayat berat badan lahir rendah (< 2.500 gram) ataupun panjang badan lahir rendah (<45 cm) ataupun riwayat kelahiran kurang bulan ( $\leq$  37 minggu);
- Memastikan anak usia 0-6 bulan mendapatkan ASI eksklusif;
- Memastikan anak usia 6-23 bulan mendapatkan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) dengan kandungan gizi lengkap terutama protein hewani;
- Memastikan anak usia 0-23 bulan mendapatkan imunisasi dasar dan lanjutan lengkap sesuai usia;
- Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak

usia 0-23 bulan sesuai dengan standar/usia;

- Pendampingan Keluarga dengan anak usia 0-23 bulan dengan infeksi kronis yang mendapatkan tatalaksana kesehatan;
- Pendampingan anak usia 0-23 bulan dengan masalah gizi (weight faltering (kenaikan berat badan tidak memadai), underweight (berat badan kurang), gizi kurang, gizi buruk dan stunting) mendapatkan tambahan asupan gizi dan tata laksana kesehatan;
- Pendampingan anak usia 0-23 bulan dengan masalah perkembangan mendapatkan tatalaksana kesehatan;
- Tim Pendamping Keluarga memastikan Keluarga yang memenuhi persyaratan menerima bantuan sosial, menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur;
- Tim Pendamping Keluarga memastikan Keluarga memiliki akses minum air layak, sarana rumah sehat, memiliki jamban sehat;
- Tim Pendamping Keluarga melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan pendampingan anak usia 0-23 bulan (baik dilakukan melalui aplikasi maupun secara manual).

c. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan penggunaan dukungan operasional antara lain:

- 1) Sasaran pendampingan laki-laki dan perempuan sebagai catin/caPUS;
- 2) Sasaran pendampingan Ibu Hamil;
- 3) Sasaran pendampingan Ibu pasca persalinan;
- 4) Sasaran pendampingan Keluarga memiliki anak usia 0- 23 bulan.

d. Lingkup Pembiayaan

Lingkup pembiayaan operasional pendampingan Keluarga berisiko *stunting* sasaran oleh Tim Pendamping Keluarga adalah biaya operasional dukungan pelaksanaan rangkaian lingkup kegiatan Tim Pendamping Keluarga yaitu inventarisasi dan pemutakhiran data sasaran, pelaksanaan pendampingan, pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pendampingan kepada sasaran serta kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga. Dukungan pembiayaan sebesar Rp330.000.00/Tim diberikan 10 (sepuluh) bulan dalam 1 (satu) tahun.

e. Output

- 1) Daftar inventarisasi sasaran dan pemutakhirannya; dan
- 2) Rekapitulasi Laporan Hasil Pendampingan per kabupaten/kota yang dilaporkan setiap per 3 (tiga) bulan.

3. Operasional Pencatatan Hasil Pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting*

a. Definisi



Merupakan kegiatan pencatatan dan pelaporan hasil pemantauan pendampingan sasaran berisiko *stunting* dan balita yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga kepada sasaran Berisiko *Stunting*. Pengamatan kepada sasaran bertujuan untuk memprediksi dan mendeteksi dini faktor resiko *stunting*, memonitor, mengevaluasi, dan memperbaiki kondisi sasaran, serta menyediakan data dan informasi kondisi sasaran.

b. Rincian Kegiatan

Tim Pendamping Keluarga melakukan pemantauan dan pendampingan kepada sasaran berisiko *stunting* dan hasil pendampingan terhadap sasaran dilakukan pencatatan dan sehingga didapatkan data yang *update* dan terkini di wilayah desa/kelurahan masing-masing Tim Pendamping Keluarga melaporkan secara berkala.

c. Lingkup Pembiayaan

Operasional Pemantauan Pendampingan Sasaran Berisiko *Stunting* tingkat desa/kelurahan merupakan kegiatan dalam bentuk pembiayaan operasional yang dapat digunakan untuk pembelian paket data/pulsa, dan/atau penggunaan transportasi, pembelian alat tulis kantor, dan/atau keperluan *photo copy* ataupun biaya lainnya. Dukungan pembiayaan sebesar Rp100.000,00 diberikan 10 (sepuluh) bulan dalam 1 (satu) tahun dan diberikan kepada para anggota Tim Pendamping Keluarga sesuai dengan SK Tim Pendamping Keluarga yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

d. Sasaran Kegiatan

Calon pengantin (catin)/calon Pasangan Usia Subur (caPUS), Ibu Hamil, Ibu Pasca Persalinan, anak usia 0 – 23 bulan.

e. *Output*

*Output* kegiatan Operasional Pemantauan Pendampingan Sasaran Berisiko *Stunting* tingkat desa/kelurahan adalah tersedianya data dan informasi terkini tentang kondisi kesehatan Calon Pengantin/Calon Pasangan Usia Subur, Ibu Hamil, Ibu Pasca Persalinan, Anak Usia 0 – 23 bulan untuk mendeteksi secara dini faktor risiko *stunting* berdasarkan hasil dari pelaksanaan pendampingan Keluarga di setiap wilayah.

4. Koordinasi TPPS di tingkat kabupaten/kota

a. Definisi

Koordinasi TPPS di tingkat kabupaten/kota merupakan kegiatan operasional yang mengikutsertakan TPPS dan mitra kerja lainnya di tingkat kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan yang mendukung dan memastikan pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan *stunting* di wilayahnya.

b. Rincian Kegiatan

Koordinasi TPPS di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan dalam bentuk: pertemuan (luring/daring), koordinasi, fasilitasi, konsultasi, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung Aksi Konvergensi percepatan penurunan *stunting*.

Dalam penyusunan rincian kegiatan agar berkoordinasi dengan Bappeda selaku Koordinator Bidang Koordinasi dan Konvergensi TPPS.

c. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan koordinasi TPPS di tingkat kabupaten/kota yaitu:

- a) TPPS tingkat kabupaten/kota;
- b) mitra kerja lainnya.

d. Lingkup Pembiayaan

Pembiayaan pelaksanaan koordinasi TPPS di tingkat kabupaten/kota dalam mendukung dan memastikan pelaksanaan Aksi Konvergensi percepatan penurunan stunting meliputi:

- 1) Belanja transportasi lokal;
- 2) Belanja perjalanan dinas dalam kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah paling banyak 15% dari total pagu operasional TPPS;
- 3) Belanja konsumsi pertemuan/rapat di dalam/di luar kantor wilayah kerja kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah;
- 4) Belanja honor, transportasi dan/atau akomodasi narasumber bagi ASN maupun Non ASN, dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan keuangan yang berlaku.

e. *Output*

*Output* dari kegiatan Koordinasi TPPS di tingkat kabupaten/kota adalah laporan pelaksanaan kegiatan aksi konvergensi percepatan penurunan *stunting*.

Laporan tersebut terdiri atas:

- 1) Laporan Semester I (pelaksanaan kegiatan selama bulan Januari-Juni) yang dilaporkan di bulan Juli;
- 2) Laporan Semester II (pelaksanaan kegiatan selama bulan Juli-Desember) yang dilaporkan di bulan Desember; dan
- 3) Laporan Reviu Kinerja Tahunan (pelaksanaan kegiatan selama bulan Januari-Desember) yang dilaporkan di bulan Januari tahun berikutnya.

Laporan dimaksud dilaporkan secara periodik ditujukan kepada:

- 1) Ketua TPPS di tingkat kabupaten/kota;
- 2) Ketua TPPS provinsi;
- 3) Ketua Pelaksana Sekretariat *Stunting* BKKBN Pusat dengan tembusan Direktorat Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga; dan
- 4) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

5. Audit kasus *stunting*

a. Definisi

Audit kasus *stunting* adalah identifikasi risiko dan penyebab risiko pada kelompok sasaran berbasis surveilans rutin atau sumber data lainnya.

b. Rincian Kegiatan

Kegiatan audit kasus *stunting* dalam 1 (satu) kali/siklus mencakup 4 (empat) tahapan audit kasus *stunting* yaitu:

- 1) Pembentukan tim audit kasus *stunting* di Kabupaten/Kota;
- 2) Pelaksanaan audit kasus *stunting* dan manajemen pendampingan keluarga;
- 3) Diseminasi hasil audit kasus *stunting* dan Rencana Tindak Lanjut
- 4) Evaluasi Rencana Tindak Lanjut dan evaluasi perubahan status risiko kasus audit *stunting*.

Kegiatan audit kasus *stunting* dilaksanakan 2 (dua) kali/siklus dalam 1 tahun. Masing-masing siklus melaksanakan tahapan pelaksanaan audit kasus *stunting*. Khusus Tahap 1 (pembentukan tim audit kasus *stunting*) dilakukan pada tahap awal jika belum terbentuk tim.

c. Sasaran Kegiatan

Keluarga berisiko *stunting* yang meliputi:

- 1) Calon pengantin/Calon PUS;
- 2) Ibu hamil;
- 3) Ibu pascapersalinan; dan
- 4) Anak 0-59 bulan.

d. Lingkup Pembiayaan

Lingkup pembiayaan dari kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan dalam proses audit kasus *stunting* mencakup:

- 1) Biaya konsumsi;
- 2) Biaya transportasi bagi ASN maupun Non ASN;
- 3) Narasumber Pakar; dan
- 4) Paket pulsa dan/atau paket data Telekonsultasi apabila koordinasi dilakukan secara daring.

e. Output

Laporan Audit Kasus *Stunting* per siklus (2 kali per tahun)

6. Mini Lokakarya Kecamatan

a. Definisi

Mini Lokakarya Kecamatan dalam upaya percepatan penurunan *stunting* merupakan kegiatan pertemuan di kecamatan yang diinisiasi dan dipimpin oleh camat dalam rangka mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pendampingan Keluarga dan hasil pemantauan pendampingan Keluarga di tingkat kecamatan agar terwujud 3 (tiga) standar: (1) Tim Pendamping Keluarga yang terlatih; (2) Tersedia Alat Ukur/Aplikasi Pengukuran untuk sasaran *Stunting*; dan (3) Tersedia dan terlaksananya Prosedural Operasional percepatan penurunan *stunting* dan terwujudnya 4 (empat) PASTI: (1) Memastikan semua sasaran terdata; (2) Memastikan semua sasaran memperoleh pelayanan; (3) Memastikan semua sasaran memanfaatkan intervensi dari pelayanan; dan (4) Memastikan semua pelaksanaan dan pendampingan tercatat dan dilaporkan.

b. Rincian Kegiatan

Mini Lokakarya tingkat kecamatan merupakan kegiatan pertemuan untuk mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pendampingan Keluarga dan hasil dari pelaksanaan dan pemantauan pendampingan Keluarga di tingkat kecamatan serta pembinaan (*coach*) Tim Pendamping Keluarga agar terwujudnya 3 (tiga) STANDAR dan 4 (empat) PASTI. Kegiatan diinisiasi oleh Pengurus TP PKK kecamatan dan dipimpin oleh Camat. Dalam kegiatan Mini Lokakarya ini salah satunya dapat diagendakan pemaparan materi dari Kepala Puskesmas atau perwakilannya tentang data kondisi *stunting by name by addres*, Pemaparan dari PKB, PLKB dalam capaian Program Bangga Kencana dan pelaksanaan pendampingan Keluarga resiko *stunting* dalam percepatan penurunan *stunting* yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga di wilayahnya. Mini Lokakarya tingkat kecamatan dilakukan minimal 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun. Pertemuan dapat dilakukan secara berkelompok melalui luring dan/atau daring.

c. Sasaran Kegiatan

Sasaran Mini Lokakarya tingkat kecamatan yaitu pelaksana Mini Lokakarya di tingkat Kecamatan yang meliputi Camat, Kepala Puskesmas, Tenaga Gizi, Dokter, Bidan dan tenaga kesehatan lainnya, Pengurus Tim Penggerak PKK Kecamatan, Penyuluh KB, PLKB ASN dan Non ASN, Koordinator Statistik Kecamatan, Pengurus IBI Ranting, Pengurus KUA, Pengurus Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), Satuan Tugas percepatan penurunan *stunting*, Tim Pendamping Keluarga, Danramil, Kapolsek dan pihak-pihak terkait lainnya di tingkat Kecamatan yang berpartisipasi dalam mini lokakarya tingkat Kecamatan.

d. Lingkup Pembiayaan

Mini Lokakarya tingkat kecamatan terdiri atas Biaya Konsumsi, dan/atau transportasi, dan/atau dapat menghadirkan fasilitator pada beberapa pelaksanaan Mini Lokakarya apabila dibutuhkan.

e. *Output*

*Output* Mini Lokakarya tingkat Kecamatan yaitu tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan pendampingan Keluarga dan pembinaan Tim Pendamping Keluarga serta laporan kondisi pelaksanaan pendampingan Keluarga dan program percepatan penurunan *stunting* di seluruh desa/kelurahan dalam satu wilayah kecamatan.

E. Pembinaan Program Bangga Kencana bagi masyarakat oleh kader PPKBD dan Sub-PPKBD

1. Operasional Pelaksanaan Pemutakhiran Data Wilayah Kerja

a. Definisi

Operasional pelaksanaan pemutakhiran data wilayah kerja oleh kader adalah biaya operasional yang diberikan kepada PPKBD dan Sub-PPKBD untuk melakukan pemutakhiran data pengendalian lapangan di tingkat desa.

- b. Rincian Kegiatan  
Pemutakhiran data pengendalian lapangan Poktan (BKB, BKR, BKL, UPPKA), rumah dataku, Kampung KB, data SDM lini lapangan (PPKBD dan Sub-PPKBD) yang ada di tingkat desa di wilayah kerjanya yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari kader poktan, dengan menggunakan formulir K/0 untuk Poktan dan setara Poktan R/I Poktan serta K/0 dan R/I PPKBD/Sub-PPKBD.
  - c. Sasaran Kegiatan
    - 1. PPKBD; dan
    - 2. Sub-PPKBD.
  - d. Lingkup Pembiayaan  
Biaya operasional pelaksanaan pemutakhiran data wilayah kerja yang diberikan kepada PPKBD dan Sub-PPKBD dilakukan 2 (dua) kali setiap tahun sebesar Rp. 100.000.-.
  - e. *Output*  
Terkumpulnya data Poktan yang dapat dijadikan data dasar Program Bangga Kencana di tingkat desa/kelurahan yang dimiliki dan dapat digunakan oleh kader PPKBD dan Sub-PPKBD untuk perkembangan wilayah kerjanya.
2. Operasional Pelaksanaan KIE
- a. Definisi  
Merupakan kegiatan pelaksanaan promosi, sosialisasi Program Bangga Kencana yang disampaikan oleh kader PPKBD atau Sub-PPKBD dan/atau Tenaga Lini Lapangan melalui pelayanan KIE kepada sasaran langsung yaitu Keluarga dan masyarakat di wilayah desa/kelurahan, kader PPKBD atau Sub-PPKBD di wilayah desa/kelurahan setempat.
  - b. Rincian Kegiatan  
Operasional Pelaksanaan KIE Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan *stunting* oleh kader KB (PPKBD dan Sub-PPKBD) dan/atau Tenaga Lini Lapangan dapat dilakukan kunjungan langsung kepada Keluarga, masyarakat, Poktan, maupun dalam pertemuan lainnya.
  - c. Sasaran Kegiatan  
Sasaran kegiatan adalah Keluarga termasuk remaja, calon pengantin/calon pasangan usia subur, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, ibu menyusui, Keluarga yang memiliki anak usia 0 – 59 bulan, lansia dan anggota Poktan (BKB, BKR, BKL, PIK R, dan UPPKA).
  - d. Lingkup Pembiayaan  
Lingkup pembiayaan operasional pelaksanaan KIE oleh kader PPKBD dan Sub-PPKBD dan/atau Tenaga Lini Lapangan di wilayah kerjanya adalah biaya operasional untuk dukungan pelaksanaan promosi, KIE, penggerakan, pembinaan, pencatatan dan pelaporan/pemutakhiran data Keluarga serta lainnya yang dilakukan oleh kader PPKBD atau Sub-PPKBD minimal 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp. 100.000.-.
  - e. *Output* Kegiatan

- 1) Meningkatnya kesertaan ber-KB;
  - 2) Meningkatnya partisipasi Keluarga dalam Poktan BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKA; dan
  - 3) Meningkatnya partisipasi anggota Keluarga untuk memeriksakan kesehatannya di Posyandu dan/atau Fasyankes.
3. Dukungan Media KIE
- Dukungan Media KIE yang dimaksud adalah dukungan pembuatan/produksi dan/atau penayangan/penempatan (*placement*) media yang digunakan untuk menayangkan pesan Program Bangga Kencana dan Pencegahan *Stunting*, yang terdiri atas:
- a. Media Elektronik
    - 1) Definisi  
Sarana/media/saluran untuk menyampaikan pesan dan gagasan kepada khalayak yang berbasis elektronik. Media elektronik dalam Petunjuk Teknis ini dibatasi berupa: (1) Televisi; (2) Radio; dan (3) Media Online.
    - 2) Rincian Kegiatan  
Pembuatan/produksi dan/atau penayangan/ penempatan (*placement*) media elektronik yang digunakan untuk menayangkan pesan Program Bangga Kencana dan Pencegahan *Stunting* sebagai pendukung kinerja kader di lini lapangan.
    - 3) Sasaran Kegiatan  
Remaja, catin/caPUS, dan Keluarga.
    - 4) Lingkup Pembiayaan
      - a) Biaya produksi (*talkshow*/iklan layanan masyarakat /*psa* /*adlibs*/*jingle*);
      - b) Biaya penayangan/*placement*.
    - 5) *Output*  
Tersampainya materi KIE Program Bangga Kencana dan Pencegahan *Stunting* melalui media elektronik di kabupaten dan kota.
  - b. Media Cetak
    - 1) Definisi  
Sarana/media/saluran untuk menyampaikan pesan dan gagasan kepada khalayak yang berbasis cetakan (*printing*). Media cetakan dalam Petunjuk Teknis ini dibatasi berupa: (1) Leaflet; (2) Poster.
    - 2) Rincian Kegiatan  
Pembuatan/produksi dan/atau penayangan / penempatan (*placement*) media cetakan yang digunakan untuk menayangkan pesan Program Bangga Kencana dan Pencegahan *Stunting*.
    - 3) Sasaran Kegiatan  
Remaja, catin/caPUS, dan Keluarga.
    - 4) Lingkup pembiayaan
      - a) Biaya pembuatan/produksi (*desain/layout*);
      - b) Biaya penempatan media cetak (contoh: akrilik untuk

- poster dan *leaflet*);
  - c) Biaya penggandaan/perbanyak; dan
  - d) Biaya distribusi.
- 5) *Output*  
Tersampaiannya materi KIE Program Bangga Kencana dan Pencegahan *Stunting* melalui media cetakan di kabupaten dan kota.
- c. Media Luar Ruang
  - 1) Definisi  
Sarana/media/saluran untuk menyampaikan pesan dan gagasan kepada khalayak yang berbasis media luar ruang. Media luar ruang dalam Petunjuk Teknis ini dibatasi berupa: (1) Spanduk; (2) Baliho; dan (3) Umbul-umbul.
  - 2) Rincian Kegiatan  
Pembuatan/produksi dan/atau penempatan (*placement*) media luar ruang yang digunakan untuk menayangkan pesan Program Bangga Kencana dan Pencegahan *Stunting* dan dapat memanfaatkan momentum strategis nasional ataupun lokal kedaerahan.
  - 3) Sasaran Kegiatan  
Remaja, catin/caPUS, dan Keluarga.
  - 4) Lingkup Pembiayaan
    - a) Biaya pembuatan/produksi (desain/layout);
    - b) Biaya penggandaan/perbanyak; dan
    - c) Biaya penempatan media luar ruang.
  - 5) *Output*  
Tersampaiannya materi KIE Program Bangga Kencana dan Pencegahan *Stunting* melalui media luar ruang di kabupaten dan kota.
- d. Media Tradisional dan Kearifan Lokal
  - 1) Definisi  
Sarana/media/saluran untuk menyampaikan pesan dan gagasan kepada khalayak yang berbasis seni tradisi dengan kearifan lokal. Media tradisional dan kearifan lokal dalam Petunjuk Teknis ini dibatasi berupa:
    - Drama/Lakon /Pertunjukan Rakyat;
    - Puisi/Pantun/ Gurindam/kesenian budaya lainnya yang lekat dengan unsur lisan.
  - 2) Rincian Kegiatan  
Pembuatan/produksi dan/atau penayangan (*placement*) media tradisional dan kearifan lokal yang digunakan untuk menayangkan pesan Program Bangga Kencana dan Pencegahan *Stunting* dan dapat memanfaatkan momentum strategis.
  - 3) Sasaran Kegiatan  
Remaja, catin/caPUS, dan Keluarga.
  - 4) Lingkup Pembiayaan
    - a) Biaya pembuatan/produksi;
    - b) Biaya penayangan/*placement*.

5) *Output*

Tersampaiannya materi KIE Program Bangga Kencana dan Pencegahan *Stunting* melalui media tradisional dan kearifan lokal di kabupaten dan kota.

4. Dukungan Manajemen

Dukungan manajemen merupakan dukungan operasional untuk pembiayaan pengelola keuangan BOKB, alat tulis kantor, termasuk rapat-rapat atau pertemuan dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam lingkup pengelolaan dana BOKB.

a. Definisi

Dukungan manajemen adalah dukungan terhadap pengelolaan dana BOKB.

b. Lingkup Pembiayaan

- 1) dukungan administrasi, seperti alat tulis kantor, penggandaan materi, dan/atau penjilidan;
- 2) biaya konsumsi, honor narasumber dan biaya transportasi/uang saku bagi Peserta; dan
- 3) rapat-rapat/pertemuan koordinasi, sosialisasi dan perencanaan bagi pengelola Program Bangga Kencana di Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen, serta monitoring dan evaluasi dari kecamatan ke kabupaten dan kota dan/atau sebaliknya.

c. Sasaran Kegiatan

Pelaksana kegiatan BOKB.

d. *Output*

Tersedianya dukungan pembiayaan untuk mendukung pengelolaan BOKB serta penurunan *stunting*.



### BAB III PELAPORAN BOKB

#### A. Mekanisme Penyampaian Laporan

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud disertai dengan rekapitulasi SP2D penyaluran Dana BOKB, disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) melalui aplikasi disampaikan kepada Kementerian Keuangan sebagai syarat penyaluran melalui Aplikasi Pelaporan DJPK (ALADIN) .

Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen menyampaikan Laporan ke Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melalui Sistem Pelaporan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi DAK Subbidang KB (Morena) secara triwulan, dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan laporan realisasi penggunaan dana BOKB yang telah diverifikasi oleh dana BKKBN serta rekapitulasi SP2D kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kepala BKKBN sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
2. Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan realisasi penggunaan BOKB kepada BKKBN melalui Sistem Pelaporan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi DAK Subbidang KB (Morena) berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah triwulan pelaporan berakhir;
3. Tim pengendali DAK tingkat Provinsi melakukan validasi dan verifikasi atas laporan realisasi pada butir 2 (dua) paling lambat 5 (lima) hari setelah laporan diterima; dan
4. Tim pengendali DAK tingkat Pusat c.q Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara melakukan analisis atas laporan yang diterima untuk dilaporkan kepada Kepala BKKBN.

#### B. Formulir Penyusunan Laporan

Formulir penyampaian laporan, disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik serta formulir pelaporan BOKB pada Aplikasi Morena. Formulir laporan realisasi penyerapan dana diisi dan ditandatangani oleh Kepala Biro/Badan/Dinas pengelola keuangan Daerah, sedangkan laporan realisasi penggunaan dana diisi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen.

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN  
DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA  
BERENCANA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... TAHUN  
ANGGARAN ...  
SAMPAI DENGAN TAHAP ...

No.	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan				Realisasi			KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	PAGU DAK	TOTAL PENYERAPAN	%
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Pagu DAK Non Fisik	Kesesuaian DPA dgn Petunjuk Teknis	Keuangan					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	Jumlah Anggaran	%	(10)	(11)	(12)
I	Balai Penyuluhan KB											
1	Operasional Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan											
2	.... Dst											
II	Pelayanan KB											
1	Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi											
2	.... Dst											
III	Penggerakan di Kampung KB											
1	Pembekalan Pokja Kampung KB											
2	.... Dst											
IV	Penurunan <i>Stunting</i>											
1	Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit <i>Stunting</i>											
2	.... Dst											
V	Pembinaan Program Bangga Kencana bagi masyarakat oleh kader PPKBD dan Sub-PPKBD											

No.	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan				Realisasi			KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	PAGU DAK	TOTAL PENYERAPAN	%
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Pagu DAK Non Fisik	Keuangan						
					Jumlah Anggaran	Jumlah Anggaran	%					
1	Operasional Pelaksanaan Pemutakhiran Data Wilayah Kerja											
2	.... Dst											
TOTAL												

Tempat....., Tanggal  
Kepala SKPD Teknis  
(tanda tangan asli dan cap dinas)  
Nama .....  
NIP .....

## BAB IV PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun 2024 ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan (menu dan sub menu) yang telah dialokasikan. Selanjutnya dalam penerapannya Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen yang menerima BOKB wajib mengacu dan menindaklanjuti Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun 2024.

Dalam pelaksanaannya dukungan dana BOKB agar tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan dan apabila dikemudian hari terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan dana BOKB maka akan dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan pada penyusunan pedoman penggunaan dana BOKB selanjutnya

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI